

STRUKTUR ORGANISASI DAN MEKANISME KELEMBAGAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT *)

Oleh : Djudju Sudjana **)

A. Rasional

Penyusunan dan/atau pemantapan organisasi dan mekanisme kelembagaan pengabdian kepada masyarakat didasarkan atas alasan-alasan di bawah ini.

1. Alasan Juridis

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi :

- a. Pasal 35 menyatakan bahwa organisasi universitas/institut terdiri atas unsur pelaksana akademik: Fakultas, Lembaga Penelitian, dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Pasal 43 menjelaskan dalam ayat :
 - (1) Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi melalui Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, Fakultas, Pusat Penelitian, Jurusan, Laboratorium, kelompok dosen dan perorangan;
 - (2) Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana di Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan;
 - (3) Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas Pimpinan, Tenaga Ahli dan Tenaga administrasi;
 - (4) Pimpinan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan bertanggung jawab kepada pimpinan Universitas/Institut yang bersangkutan.

3. Alasan Fungsional

Allanya organisasi dan mekanisme lembaga pengabdian kepada masyarakat adalah untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan fungsi perguruan tinggi dalam dharma pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat yaitu menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian langsung kepada masyarakat, secara melengkung, melalui metodologi ilmiah, sebagai tanggung jawab luhur perguruan tinggi dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat sehingga dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional

*) Disampaikan pada Sarasehan PPM ke-2 di LPM Institut Pertanian Bogor tanggal 2 Maret 1991

**) Ketua LPM IKIP Bandung

4. Alasan Manajerial

Organisasi adalah produk dari fungsi manajemen, yaitu pengorganisasian, untuk menjamin kelancaran penjabaran kebijaksanaan, tugas-tugas, dan program lembaga pengabdian kepada masyarakat. Pengorganisasian merupakan kegiatan memadukan sumber-sumber, terutama sumber manusia, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Hersey dan Blanchard, 1982). Dengan demikian organisasi adalah gabungan orang-orang yang bekerjasama berdasarkan pembagian tugas, peraturan dan scrana untuk mencapai tujuan.

Organisasi diperlukan karena manusia mempunyai keterbatasan baik mental maupun fisik (Schemerhorn dkk, 1985). Karena organisasi sangat tergantung kepada penampilan orang-orang yang tergabung di dalamnya maka organisasi disebut sistem sosial. Organisasi dapat pula disebut sistem terbuka karena di dalamnya terdapat transformasi sumber-sumber manusia dan non-manusia, sebagai masukan dari lingkungannya (environmental inputs), yang kemudian didayagunakan dalam kegiatan (process) untuk mencapai tujuan (outputs) yang bermanfaat bagi lingkungannya.

Secara garis besar, struktur organisasi terdiri atas dua tipe, yaitu tipe organik (perilaku) dan tipe mekanistik (klasik). Tipe organik menitik beratkan pada koordinasi tugas-tugas dan adanya loyalitas orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tipe ini mempunyai ciri keterbukaan, berorientasi pada pemecahan masalah, cepat menyesuaikan dengan dan mengantisipasi keadaan, bercorak kepasyarakat, relatif luwes, dan memungkinkan adanya interaksi informal. Sedangkan tipe mekanistik lebih menitikberatkan pada instruksi dan keketatan disiplin. Ciri-ciri tipe ini adalah tertutup, program terpusat, rutin, statis, berorientasi teknis, dan hubungan formal yang ketat. Walaupun kedua tipe organisasi itu memiliki kelemahan masing-masing, faktor-faktor kelebihan keduanya dapat diterapkan dalam setiap struktur organisasi sehingga dapat saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya.

Dari berbagai struktur organisasi seperti struktur organisasi lini, lini dan staf, fungsional, proyek, atau kepanitiaan (Flippo, 1975; Siagian, 1982), maka struktur organisasi lini dan staf dianggap lebih cocok untuk lembaga pengabdian pada masyarakat.

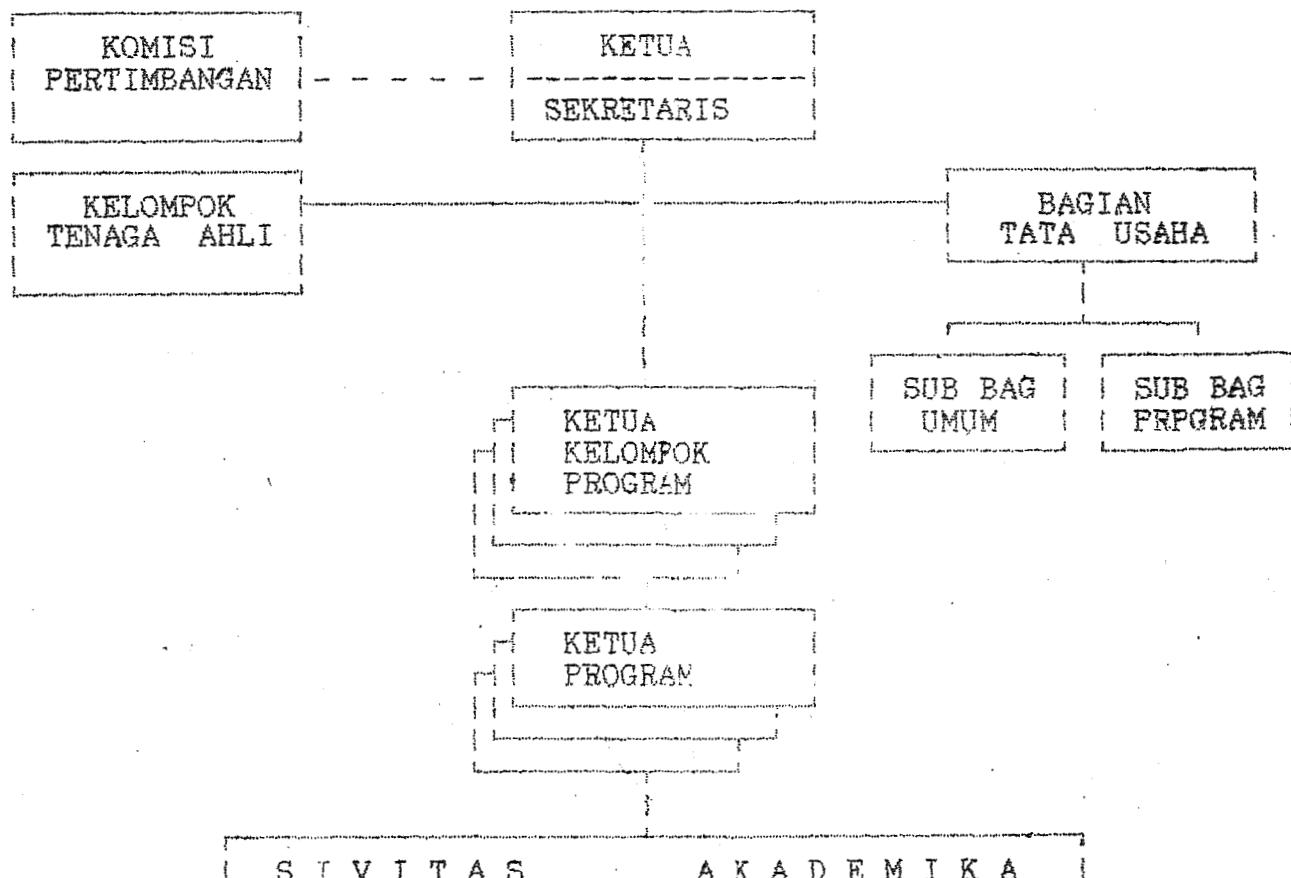
B. Struktur Organisasi LPM

Pemilihan struktur organisasi lini didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut. Pertama, struktur organisasi ini cocok untuk diterapkan pada LPM karena terdapat keragaman tanggung jawab, wewenang, dan tugas dari orang-orang yang

terlibat dalam lembaga ini. Keragaman tersebut berkaitan pula dengan fungsi pimpinan dan staf. Kedua, orang-orang yang terlibat dalam lembaga dapat dikelompokkan ke dalam kelompok lini dan kerlompok staf. Kelompok lini mempunyai kewajiban melaksanakan tugas pokok lembaga, sedangkan kelompok staf berkewajiban untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok lembaga. Staf dibentuk dengan tugas untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang merupakan bagian dari keseluruhan pekerjaan yang dilakukan lembaga. Ketiga, Pimpinan LPM melakukan hubungan langsung ke atas (Rektor), ke bawah (sivitas akademika), dan ke samping (Fakultas/Lembaga). Dalam struktur organisasi lini dan staf ini memungkinkan lembaga pengabdian pada masyarakat untuk menyeimbangkan perhatian terhadap lingkungan dalam dan luar lembaga.

Struktur organisasi lembaga pengabdian pada masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan Struktur Organisasi
lembaga pengabdian pada masyarakat



..... Garis Konsultasi
..... Garis Fungsional

Ketua Lembaga diangkat oleh Rektor atas nama Menteri, bertanggung jawab kepada Rektor, dengan masa jabatan 4 tahun untuk setiap periode. Ketua lembaga, karena kedudukannya, menjadi Anggota Senat Perguruan Tinggi. Ketua dibantu oleh Sekretaris Lembaga yang diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.

Komisi pertimbangan adalah tenaga akademik senior berasal dari dan diusulkan oleh fakultas-fakultas dan lembaga penelitian, diangkat/ditugaskan oleh Rektor atas persetujuan Ketua lembaga.

Kelompok Tenaga Ahli adalah tenaga akademik yang berasal dari Jurusan/Program Studi yang diusulkan oleh Fakultas dan atas permintaan/persetujuan Ketua Lembaga, diangkat/ditugaskan oleh Rektor.

Bagian/Sub bagian Tata Usaha adalah tenaga administrasi yang ditugaskan oleh Rektor. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian dan membawahi Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Program, masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Ketua Kelompok Program berasal dari kelompok Tenaga Ahli, ditugaskan oleh Rektor atas usul Ketua Lembaga. Ketua Program berasal dari Kelompok Tenaga Ahli, ditugaskan oleh Rektor atas usul Ketua Lembaga. Masa jabatan Ketua Kelompok Program dan Ketua Program disesuaikan dengan kebutuhan dan lamanya waktu penyelenggaraan program.

Sivitas Akademika adalah tenaga akademik dan mahasiswa.

C. Mekanisme Lembaga

Dalam melaksanakan fungsiannya, mekanisme lembaga pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yaitu melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, supervisi, monitoring, evaluasi, dan pengembangan program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan ditingkat perguruan tinggi.
2. Mengkoordinasi penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Fakultas, Pusat, Unit Pelaksana Teknis, Jurusan, Laboratorium, dan Tenaga Akademik baik kelompok maupun perorangan
3. Melakukan kerjasama, atas nama pimpinan perguruan tinggi, mengenai pengabdian kepada masyarakat, dengan perguruan tinggi dan badan-badan lainnya baik di dalam maupun di luar negeri

SARASEHAN PPM II-2. 5

4. Membina dan mengembangkan kerjasama dengan unit-unit lain dalam perguruan tinggi yang bersangkutan.
5. Ikut mengusahakan sumber daya, biaya dan sarana lainnya, yang diperlukan dalam pengabdian kepada masyarakat.
6. Menyelenggarakan seminar hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat.
7. Menyebarluaskan hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat.
8. Memberikan penghargaan terhadap pelaksana dan sasaran pengabdian kepada masyarakat.
9. Menyusun dan mengembangkan peloman dan program-program pengabdian kepada masyarakat dilingkungan perguruan tinggi masing-masing
10. Melaksanakan urusan tata usaha lembaga pengabdian kepada masyarakat.

Mekanisme di atas memerlukan adanya kesepakatan dan sinkronisasi dari semua komponen di perguruan tinggi dan Perlu upaya sosialisasi mekanisme tersebut kepada seluruh sivitas akademika.

DAFTAR BACAAN

Blanchard, Kenneth H. and Hersey, Paul (1982). Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources. New Jersey: Prentice-Hall.

Flippo, Edwin B. and Musinger, Gary M. (1975). Management. Boston: Allyn and Bacon, Inc.

LPM IKIP Bandung (1988). Rencana Induk Pengabdian pada Masyarakat IKIP Bandung.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi.

Schemerhorn, John R., Hunt, James G., and Osborn, Richard N. (1985). Managing Organizational Behavior. New York: John Wiley and Sons.